



PANDEMI COVID - 19 DI NEW YORK CITY

Seorang wanita menjalani tes virus corona (COVID-19) di tempat pengujian di New York City, AS, Selasa (3/5).

IDN/ANTARA/REUTERS

Uni Eropa Ajukan Sanksi Baru pada Rusia

Sanksi Eropa ini akan mengincar industri minyak dan perbankan Rusia.

BRUSSELS (IM) - Diplomat tinggi Uni Eropa mengatakan lembaga eksekutif blok itu mengusulkan rancangan sanksi baru pada Rusia. Sanksi ini akan mengincar industri minyak dan perbankan Rusia.

Komisiner kebijakan Uni Eropa telah membahas sanksi terbaru pada Rusia ini. Mereka akan mengirimkan proposal ke 27 negara anggota.

“(Cabang eksekutif Uni Eropa) sedang mengerjakan sanksi paket ke-6 yang bertujuan untuk menghapus lebih banyak bank dari SWIFT, aktor-aktor penyebar informasi palsu dan menangani impor minyak,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell di Twitter.

SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication merupakan jaringan sistem pembayaran internasional. Sebuah sistem kirim pesan aman yang memfasilitasi pembayaran lintas batas dengan cepat, sehingga proses perdagangan internasional dapat berjalan lancar.

Negara-negara anggota Uni Eropa telah terlibat dalam penyusunan proposal. Tapi biasanya butuh waktu sehari-hari sampai mereka mendukung sebuah usulan.

Sanksi-sanksi hanya dapat ditegakkan bila sudah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa. Slovakia dan Hungaria sudah mengungkapkan keberatan untuk menandatangani.

Duta-duta besar Uni Euro

pa dijadwalkan akan menggelar rapat Kamis (5/5).

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tampaknya akan menjelaskan usulan sanksi terbaru di hadapan Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis.

SWIFT didirikan pada tahun 1970-an oleh ribuan institusi yang menggunakan sistem ini. Berbasis di Belgia, profit SWIFT pada tahun 2020 lalu sekitar 30 juta euro. Pada dasarnya sistem ini dikelola untuk melayani anggota-anggotanya.

Memutus akses bank-bank Rusia dari SWIFT akan membatasi akses negara ke pasar finansial dunia. Perusahaan dan individu Rusia akan sulit melakukan pembayaran atau menerima uang dari kegiatan ekspor-impor, meminjam atau berinvestasi ke luar negeri.

Sementara itu, presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa (3/5) menandatangani dekret yang memberlakukan tindakan pembalasan ekonomi. Dekret ini sebagai tanggapan atas tindakan dari “negara-negara tidak bersahabat” yang menjatuhkan sanksi ke Moskwa.

Dilansir Anadolu Agency, Rabu (4/5), menurut keputusan yang diterbitkan di situs website Kremlin, langkah-langkah tersebut diambil untuk melindungi kepentingan nasional Rusia. Karena tindakan tidak bersahabat dari Amerika Serikat (AS), dan negara-negara lain serta organisasi internasional bertujuan untuk

membatasi atau merampas hak milik Federasi Rusia, warga, dan badan hukum Rusia secara ilegal.

Aturan baru tersebut melarang otoritas di semua tingkatan, serta organisasi dan individu di bawah yurisdiksi Rusia untuk melakukan transaksi keuangan dengan negara Barat. Termasuk membuat kontrak perdagangan luar negeri dengan badan hukum, individu dan perusahaan.

Keputusan tersebut juga melarang pemenuhan kewajiban kepada orang dan entitas di bawah sanksi, dan transaksi

keuangan. Selain itu, melarang ekspor bahan mentah atau produk yang ditambah atau diproduksi di Rusia, jika pengguna akhir mereka adalah individu atau hak yang dikenai sanksi.

Putin menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan daftar individu dan entitas yang termasuk dalam tindakan baru dalam 10 hari ke depan. Termasuk menyelesaikan masalah teknis lainnya.

Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Federasi Rusia diberikan hak untuk menerapkan

keputusan baru secara selektif.

Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari. Serangan ini membuat dunia internasional geram. Amerika Serikat dan negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia atas tindakannya terhadap Ukraina.

Menurut perkiraan PBB, setidaknya 3.193 warga sipil telah tewas dan 3.353 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melancarkan serangan. Sementara lebih dari 5,5 juta orang telah melarikan diri ke negara lain. ● tom

Rusia Dituduh Gunakan Pemerkosaan sebagai Taktik Perang

IRPIN (IM) - Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova menuduh Rusia menggunakan pemerkosaan sebagai taktik perang. Dia juga menggambarkan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang utama abad ke-21.

Rusia sebelumnya membantah menasarak warga sipil dan menolak tuduhan bahwa pasukannya telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. Kremlin belum menanggapi permintaan untuk mengomentari tuduhan tersebut dan telah menolak sejumlah pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa Putin adalah penjahat perang.

Saat mengunjungi kota Irpin yang hancur di dekat Kiev, Jaksa Agung Iryna Venediktova mengatakan Ukraina sedang mengumpulkan informasi tentang tuduhan pemerkosaan, penyiksaan, dan dugaan tindakan kejahatan perang lainnya oleh pasukan Rusia. Venediktova mengatakan tuduhan terhadap Rusia itu termasuk pemerkosaan terhadap sejumlah wanita, pria, dan anak-anak serta seorang wanita tua.

Saat ditanya apakah pemerkosaan adalah strategi yang sengaja dilakukan Rusia dalam perang, Venediktova memberi jawaban. “Saya yakin sebenarnya itu adalah strategi. Ini, tentu saja, untuk menakut-nakuti masyarakat sipil, untuk melakukan segala upaya untuk (memaksa Ukraina) menyerah,” katanya dalam jumpa pers.

Namun, Venediktova tidak memberikan rincian tentang tuduhan pemerkosaan itu dengan alasan bahwa beberapa korban masih berada di Ukraina dan takut berbicara karena khawatir pasukan Rusia kembali. Dia menyebut Putin sebagai penjahat perang bersenjata

Rusia memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi di Ukraina.

“Putin adalah penjahat perang utama abad ke-21,” kata Venediktova.

Dia merujuk pada intervensi militer Rusia di satu negara bekas pecahan republik Soviet, Georgia, di wilayah Chechnya Rusia, di Suriah dan di Ukraina pada 2014.

“Jika kita berbicara tentang kejahatan agresi, kita semua tahu siapa yang memulai perang ini, dan orang ini adalah Vladimir Putin,” ujarnya.

Pada Maret, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak komentar Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut Putin sebagai penjahat perang.

Sementara itu, di tempat yang terpisah, Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Israel mendukung gerakan neo-Nazi di Ukraina. Pernyataan tersebut semakin meningkatkan perselisihan yang dimulai ketika Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa Adolf Hitler memiliki asal-usul Yahudi.

Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, mengatakan, pernyataan Lavrov terkait Hitler yang memiliki darah Yahudi adalah “tidak termaafkan”.

Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa (3/5) mengatakan, komentar Lapid adalah “anti-historis”. Kementerian menjelaskan alasan pemerintah Israel saat ini mendukung rezim neo-Nazi di Ukraina. Moskwa menegaskan kembali poin Lavrov bahwa, Presiden Volodymyr Zelenskyy yang merupakan seorang Yahudi tidak menghalangi Ukraina untuk dijalankan oleh neo-Nazi.

“Antisemitisme dalam kehidupan sehari-hari dan dalam politik tidak dihentikan dan sebaliknya dipupuk (di Ukraina),” ujar pernyataan Kementerian

Luar Negeri Rusia, dilansir Aljazeera, Rabu (4/5).

Israel telah menyatakan dukungan untuk Ukraina setelah Rusia melancarkan invasi pada 24 Februari lalu. Namun Israel tetap bersikap hati-hati karena tidak ingin merusak hubungan dengan Rusia, yang menjadi perantara kekuasaan di Suriah. Israel menghindari kritik langsung terhadap Moskwa, dan belum memberlakukan sanksi formal terhadap oligarki Rusia.

Israel telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan menyatakan dukungan untuk rakyatnya. Tetapi pemerintah tidak ikut menjatuhkan sanksi internasional terhadap Rusia. Namun, hubungan Israel dan Rusia semakin tegang ketika Lapid bulan lalu menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Nazisme telah menonjol dalam tujuan dan narasi perang Rusia di Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menggambarkan pertempuran itu sebagai perjuangan melawan Nazi di Ukraina, meskipun negara itu memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan seorang presiden Yahudi yang kerabatnya terbunuh dalam peristiwa Holocaust.

Putin merujuk kehadiran sejumlah unit seperti batalyon Azov di dalam militer Ukraina, sebagai salah satu alasan untuk meluncurkan operasi militer khusus. Azov adalah unit militer infanteri sukarelawan sayap kanan yang didirikan pada 2014 untuk memerangi separatisme pro-Rusia di wilayah Donbas, di Ukraina timur. Anggota Azov awalnya adalah ultranasionalis dan dituduh menyembunyikan ideologi supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Unit ini telah dimasukkan ke dalam Garda Nasional Ukraina. ● tom

Gelombang Panas Ekstrem Tewaskan 25 Orang di India

NEW DELHI (IM) - Sedikitnya 25 orang tewas akibat cuaca panas ekstrem di negara bagian Maharashtra, India barat sejak akhir Maret, kata para pejabat pada Selasa.

Berbagai negara bagian mengalami suhu panas mulai dari 42-46 derajat Celsius (107,6-114,8 derajat Fahrenheit). Jumlah kematian tertinggi sebanyak 15 orang dilaporkan di wilayah Vidarbha, enam di wilayah Marathwada dan empat di Maharashtra utara, menurut data resmi.

Sebanyak 381 kasus heat stroke tercatat di negara bagian tersebut.

“Laporan post-mortem dari enam orang telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah meninggal karena serangan panas. Kami belum menerima laporan tentang 19 orang yang tersisa,” kata seorang pejabat.

Dr. Pradeep Awate, petugas pengawasan negara bagian itu mengatakan: “Be-

berapa wilayah negara bagian itu menghadapi musim panas paling ekstrem dalam beberapa dasawarsa.”

Distrik Chandrapur menjadi wilayah paling terdampak gelombang panas dengan suhu mendekati 46 derajat Celsius.

Berbagai negara bagian termasuk Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra dan Delhi telah mencatat suhu tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini.

Pada bulan Maret, suhu maksimum rata-rata dalam sebulan adalah yang tertinggi dalam 122 tahun.

Departemen Meteorologi India (IMD) melaporkan suhu di berbagai negara bagian dalam beberapa minggu terakhir tetap 3-6 Celsius di atas normal.

IMD telah memperkirakan suhu dapat menyentuh 47 Celsius di India tengah dalam beberapa hari ke depan. ● tom

8 Warga Iran Tewas Usai Minum Miras Oplosan

TEHERAN (IM) - Delapan orang tewas akibat keracunan alkohol setelah meminum ramuan buatan sendiri di kota Bandar Abbas, Iran. Media lokal melaporkan bahwa 51 orang lainnya telah dirawat di rumah sakit.

“17 dari mereka yang dirawat di rumah sakit berada dalam kondisi kritis dalam perawatan intensif, sementara 30 lainnya menjalani dialisis untuk membersihkan sistem mereka,” kata Pejabat kesehatan Dr. Fatemeh Nowruzian, seperti dikutip dari Arab News.

Memproduksi dan mendistribusikan alkohol sangat dilarang di Iran. Polisi setempat mengatakan mereka telah menangkap delapan orang karena memproduksi dan menjual minuman terlarang itu.

Hukuman untuk mengkonsumsi alkohol dapat 80 cambukan. Tidak diungkapkan apa yang menyebabkan keracunan dalam minuman buatan sendiri, tetapi dalam beberapa tahun terakhir banyak orang Iran telah meninggal setelah minum alkohol terlarang yang mengandung metanol dalam jumlah yang mematikan.

Metanol dapat menyebabkan kebutaan atau kematian jika tertelan, bahkan dalam jumlah kecil. Bahan ini sering ditambahkan dalam produksi minuman ilegal buatan sendiri untuk meningkatkan jumlah alkohol.

Keracunan metanol meningkat tajam di Iran pada awal pandemi Covid-19 setelah desas-desus menyebar bahwa konsumsi alkohol dapat mencegah infeksi.

Kementerian Kesehatan Iran mengumumkan pada April 2020 bahwa sekitar 500 orang telah meninggal dan 5.000 lainnya dirawat karena keracunan alkohol hanya dalam tiga bulan. Kasus keracunan terbanyak dilaporkan di provinsi Alborz di utara Teheran dan Hormozgan di pantai selatan.

Hanya anggota minoritas agama yang diakui negara yang memiliki hak untuk memproduksi atau membeli minuman beralkohol di Iran.

Mereka yang melanggar undang-undang alkohol Iran dapat didenda, dicambuk atau dipenjara, tetapi minuman keras bajakan tersedia secara luas melalui pedagang ilegal. ● tom



MIGRAN KUBA

Migran Kuba berjalan di dekat jembatan perbatasan Internasional Lerdo Stanton, mereka diusir dari AS dan dikirim kembali ke Meksiko di bawah Title 42, di Ciudad Juarez, Meksiko, Selasa (3/5).

Biden Serukan Toleransi Beragama pada Perayaan Idulfitri di Gedung Putih

WASHINGTON (IM) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan toleransi antar umat beragama saat ia menjadi tuan rumah resepsi pada Senin (2/5), untuk merayakan Idul Fitri yang menandai akhir bulan suci Ramadan.

Biden memuji kontribusi Muslim AS dengan mengatakan bahwa umat Muslim membuat AS menjadi lebih kuat bahkan ketika Muslim AS menghadapi ancaman nyata di AS karena Islamofobia. “Muslim membuat bangsa kita lebih kuat setiap hari, bahkan ketika mereka masih menghadapi tantangan dan ancaman nyata dalam masyarakat kita, termasuk kekerasan yang ditargetkan dan Islamofobia,” ujar Biden, dikutip dari VOA, Selasa (3/5).

Biden yang beragama Katolik mengatakan kepada hadirin di Ruang Timor Gedung Putih bahwa ada banyak kesamaan antara ketiga agama besar.

“Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tiga agama Ibrahim merayakan hari-hari suci mereka pada waktu yang sama yakni Ramadan, Paskah dan Paskah,” katanya.

Umat Muslim merayakan hari libur Idul Fitri pada akhir Ramadan, sebuah bulan suci di mana umat Islam biasanya melakukan puasa sepanjang hari.

“Melalui puasa mereka, umat Islam menunjukkan empati atas penderitaan orang lain, memperkuat dan memperbarui tekad mereka untuk memberi dengan murah hati dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, lebih baik bagi semua yang menderita,” ungkap Biden. Shar.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum acara, Biden mengatakan bahwa tradisi kebebasan beragama untuk memperkuat negara AS, dan mereka akan terus bekerja dengan orang AS dari semua kepercayaan dan latar belakang, untuk menjaga dan memperdalam komitmen kolektif terhadap prinsip fundamental tersebut.

“Tahun ini, kami akan melanjutkan tradisi merayakan Idul Fitri di Gedung Putih, dan menghormati Muslim Amerika yang menginspirasi yang memimpin upaya untuk membangun pemahaman dan persatuan yang lebih besar di seluruh negara kami,” kata Biden. ● tom



HIDANGAN KHAS ARGENTINA

Para koki mengoleskan saus di “Neapolitan Milanese” terbesar, irisan daging dilapisi tepung roti dan hidangan khas Argentina berukuran 12 meter persegi dan beratnya lebih dari satu ton, di Lujan, di pinggir Buenos Aires, Argentina, Selasa (3/5).

IDN/ANTARA/REUTERS